

ISYU STRATEGIS DAN PEMODELAN CALON GUBERNUR

Oleh: Deni Darmawan¹

Pertanyaan yang sangat tepat jika ini disampaikan kepada warga Jabar yang selama ini hanyut dalam suasana kampanye politik dari Dai', Aman, dan Hade. Padahal belum lama ini tepatnya tanggal 26 Maret 2008 Pikiran Rakyat salah satunya menerbitkan informasi yang sangat penting, yaitu " Ringkasan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009". Padahal jika kita baca dengan seksama banyak sekali informasi penting berkenaan dengan arah dan tujuan mau dibawa ke mana Jabar ini ditahun depan oleh jajaran pimpinan dan apakah kita semua memahami dan mampu menilai akankah berhasil atau gagal dalam memenuhi dan mewujudkan harapan masyarakat Jabar.

Secara jelas di akhir informasi Ringkasa RKPD ini pihak Bapeda Provinsi Jawa Barat mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menyempatkan diri membaca, mempelajari, dan tentunya mengisi *angket Perencanaan Partisipatif untuk Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009*". Dari 5 (lima) item pertanyaan yang dirumuskan dalam angket tersebut semuanya bertujuan untuk menjaring harapan-harapan dari masyarakat terhadap program kerja pembangunan daerah yang disesuaikan dengan profil atau kondisi nyata saat ini. Demikian juga dengan kekuatan dan kemampuan sumber daya dan perangkat sistem yang dimiliki Pemda Jabar telah siap mengimplementasikan isu-isu strategis yang jika dianalisa masih perlu pembuktian dan dukungan sejumlah data yang lebih valid.

Beberapa isu strategis yang dirumuskan dalam RKPD tersebut mencakup : (1) daya saing dan perluasan kesempatan Pendidikan; (2) pengangguran, migrasi, peluang kerja, produktivitas kerja dan PHK; (3) Intensitas dan penyebaran Penyakit, Pembangunan Bidang Kesehatan; (4) Penduduk Miskin dan Kemiskinan; (5) Pergeseran Sistem Nilai-Budaya Global, Materialisme dan Hedonisme; (6) Ketersediaan Produk, Stabilitas harga Pangan dan Komoditas Strategis Ketahanan Pangan; (7) Nilai Tukar Produk, Nilai Tambah dan Daya Saing Usaha; (8) Peningkatan Investasi Daerah dan Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Jika dicermati dari penjelasan dari ke depalan isu strategis ini, maka hanya beberapa saja yang menunjukkan kondisi positif, yaitu isu strategis dalam bidang pendidikan (1), isu strategis tentang Nilai Tukar Produk (7) dan insyru strategis tentang penikatan Investasi Daerah dan Pembiayaan KUMKM. Selebihnya jika penulis analisa masih belum jelas dukungan data dan potensi yang bisa dijadikan bahan dalam merumuskan alternatif pemecahannya. Alaternatif pemecahan ini dapat dipandang juga sebagai tantangan yang harus bisa dijawab. Jawaban atas tantangan-tantangan inilah yang harus dirumuskan oleh Tim penyusun dan pengembang RKPD provinsi Jawa Barat sehingga dirumuskan berbagai program dan kegiatan yang harus diimplementasikan. Dengan demikian rangkaian kerja yang harus dilakukan masih panjang. Namuan anehnya mengapa dalam pemberiaan RKPD Provinsi ini tidak ditransfaransikan, karena sebaiknya

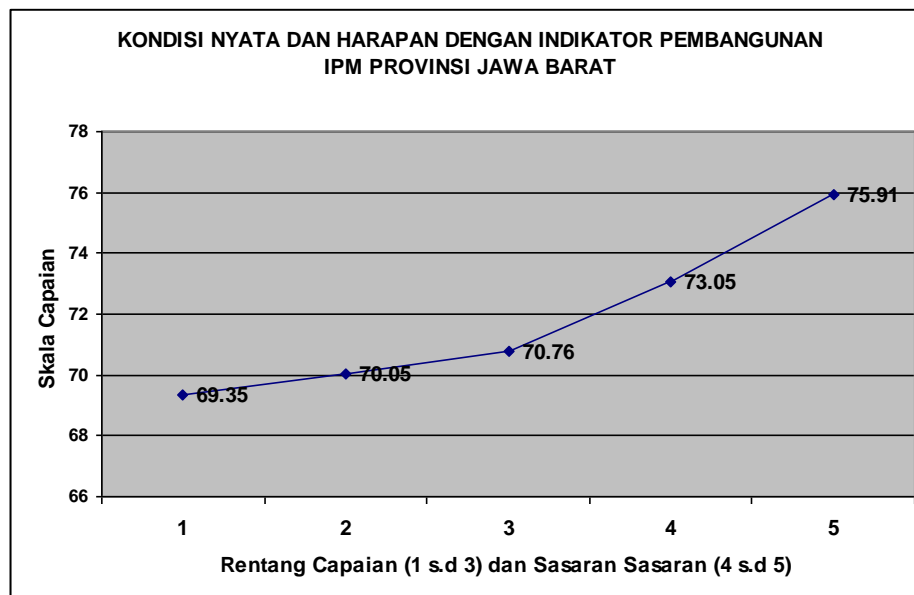
¹ Deni Darmawan, Alumni SPGN1 Bandung Pemerhati Data dan Informasi, Mengajar di UPI Bandung.

ketika program dan kegiatan yang diusung oleh Tim RKPD yang harus diperiksa oleh SKPD atau minimal dikiritisi harusnya lengkap juga dengan alokasi penganggaran. Artinya biaya satuan untuk setiap program pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD nilai rupiahnya bisa diketahui bersama. Seandainya juga dalam hal ini terdapat penyelewengan dan ketidaksesuaian alokasi dana maka masyarakat akan memahami dan mengetahui. Jika terjadi sesuai yang inkonsisten maka langkah apa yang alternatif pemecahan yang bagaimana yang hendaknya diambil oleh jajaran Pemda sehingga pembangunan di Jawa Barat bisa berjalan dengan lancar dan sesuai target tepat sasaran. Dengan demikian semua isu strategis yang dirumuskan bisa dilaksanakan dengan benar. Langkah ini patut dilakukan secara transparansi dan benar siapapun Gubernurnya.

Analisa Data Pencapaian Indikator Pembangunan

Jika kembali kepada data mengenai pencapaian indikator pembangunan pada tiga tahun sebelumnya, lihatlah pada tabel yang digambarkan pada Pikiran Rakyat terbitan 26 Maret 2008, menunjukkan bahwa capaian yang diraih oleh Provinsi Jawa Barat untuk Indikator IPM masih rendah, yaitu hanya berkisar antara 0,7 (2005 ke 2006); dan hanya 0,71 (2006 ke 2007) dengan demikian coba perhatikan Jawa Barat hanya mampu meningkatkan IPM pada masa kepemimpinan Dani Setiawan ini selama dua tahun hanya 0,01, mau bagaimana kedepannya. Belum lagi untuk aspek yang lainnya, penulis pikir sangat lemah dan rendah sekali capaian indikator pembangunan Jawa Barat ini. Dan jika diuji dengan tingkat validitas derajat signifikansi maka perubahan sebesar 0,01 ini berarti tidak ada perubahan yang signifikan.

Sebagai ilustrasi analisa, berikut penulis coba untuk melakukannya pada 5 indikator penting dan sangat vital dalam pemilihan dan penetapan dasar-dasar kebijakan pembangunan oleh SKPD yang ada di tingkat Provinsi, yaitu IPM yang terdiri atas Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Daya Beli, dan Jumlah Pengangguran.

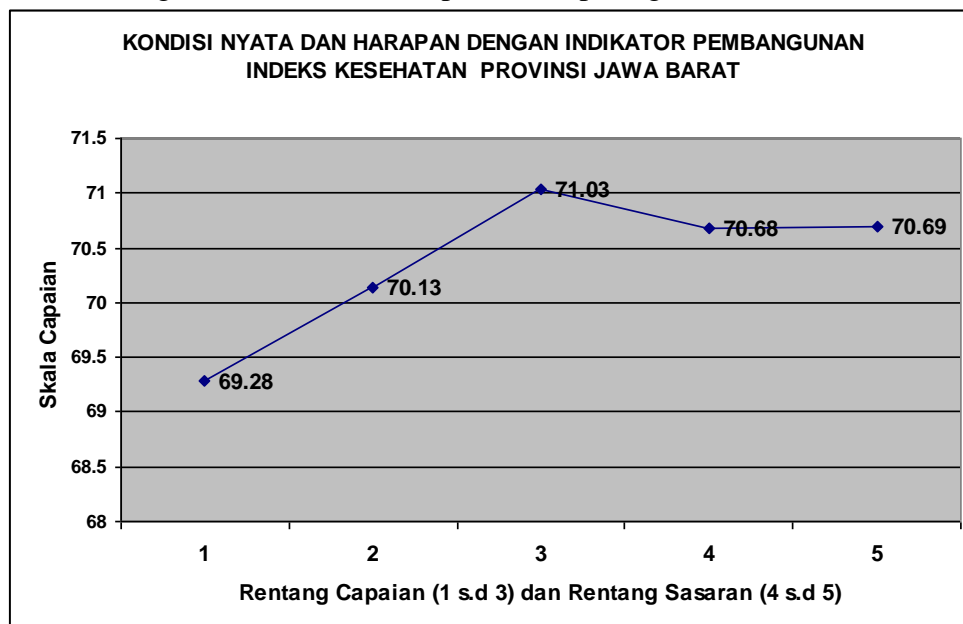


Sumber: Diolah dari Hasil Olahan Bapeda (PR, 26 Maret 2008).

Jika melihat rentang capaian maka terlihat masih belum beranjak pada skala capaian untuk rentang tahun ke-1 (2005); tahun ke-2 (2006) dan tahun ke-3 (2007) masih berada pada pada skala capaian 69 dan 70. Ini mengindikasikan sangat lemah sekali program-program yang diharapkan membantu meningkatkan capaian IPM oleh Jawa Barat ini. Ini sangat riskan jika dalam RKPD pada 2 tahun selanjutnya dijadikan dasar tract record Jawa Barat agar bisa mencapai skala capaian Sasaran yang ditetapkan untuk tahun ke-3 (2008) sebesar 73,05 dan tahun ke-4 (2009) sebesar 75,31. Sasaran tersebut tidak didukung oleh model-model program yang bisa dijadikan piloting dalam praktek-praktek program pembangunan yang mendukung peningkatan IPM dengan interval 3 sampai dengan 5, karena pada tiga tahun sebelumnya perubahan interval hanya 1. Kondisi ini akan sangat menuntut kerja keras serta dukungan semua perangkat SKPD yang dimiliki serta masyarakat Jawa Barat sehingga bisa mencapai kenaikan dengan interval yang signifikan sebagaimana telah diproyeksikan pada grafik di atas.

Kesehatan yang rapuh

Demikian juga jika melihat capaian dan target harapan yang direncanakan ingin tercapai pada tahun 2009 ini, sedikit cukup realistis dimana capaian yang terlihat ada kenaikan dari 69,28 pada tahun 2005 dan mencapai 71,03 pada tahun 2007 maka dapat diperoleh kenaikan sebesar 1,25. Adapun yang menjadi sasaran target hingga tahun 2009 sebesar 70,69 target sasaran ini cukup beralasan mengingat dari isu strategis yang dirumuskan bahwa Jawa Barat masih belum bisa mengontrol intensitas dan penyebaran penyakit yang dewasa ini banyak melanda masyarakat, khususnya di pedesaan. Dengan melalui program-program pembinaan, pembangunan infrastruktur serta sistem layanan di bidang kesehatan ini maka diharapkan target sasaran pembangunan IPM dalam bidang kesehatan di tahun 2009 minimal bisa bertahan pada titik skala capaian di atas 70,6, yaitu sebesar 70,69. Sebagaimana analisa ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



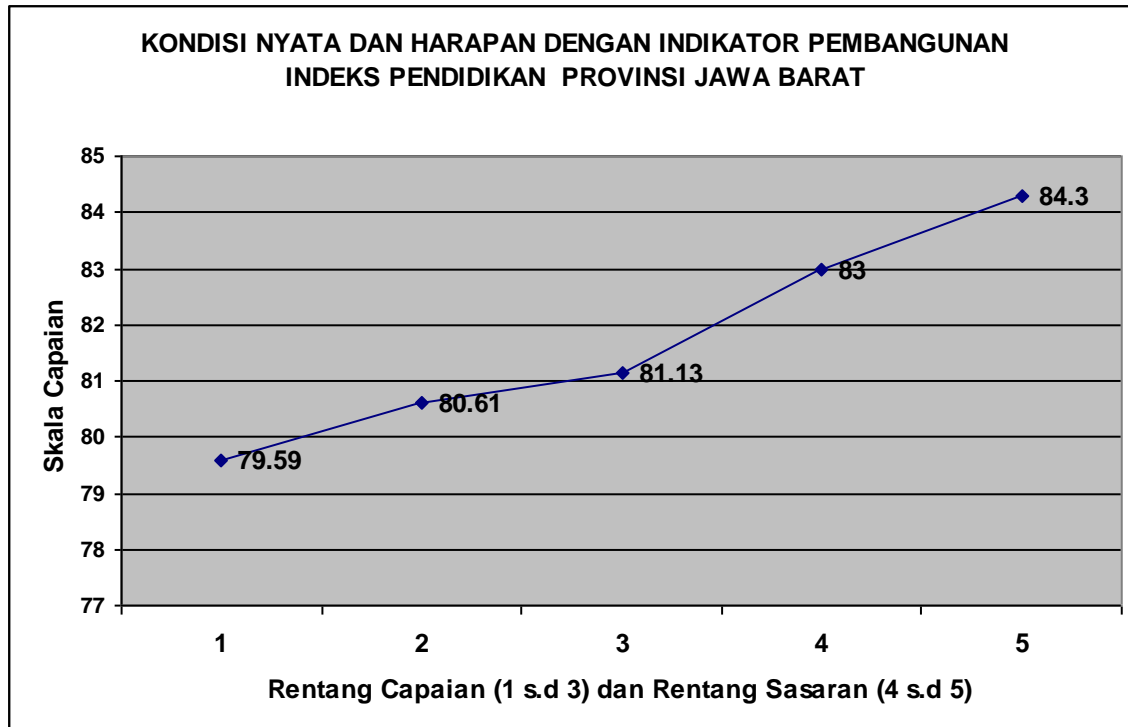
Sumber: Diolah dari Hasil Olahan Bapeda (PR, 26 Maret 2008).

Jika dikaitkan dengan aspek pencarian solusi program kegiatan untuk bidang kesehatan ini maka pemerintah Jawa Barat harus berani mencoba mengembangkan sistem

layanan kesehatan keliling, obat murah, volutir di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan, serta kesehatan keluarga dengan mencoba meningkatkan taraf kesehatan dengan mengacu kepada standar pelayanan minimal dibidang kesehatan. Sebagai misal program meningkatkan kesehatan dan gizi Anak dan Ibu menyusui dan baru melahirkan. Demikian juga dengan program pemberantasan kelaparan yang selama ini terlihat banyak sekali potensinya di daerah seperti di Kabupaten Karawang, Indramayu, Garut cenderung mayoritas penduduk miskin atau keluarga miskin cukup banyak. Hal ini akan berdampak kepada tingkat kesehatan itu sendiri.

Pendidikan yang Rapuh

Analisa selanjutnya dapat dilihat pada capaian dan target sasaran indeks pembangunan dibidang pendidikan. Dimana dari hasil pengolahan data yang bersumber dari Bapeda Jabar menunjukkan hasil sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini. Dari hasil pengolahan menunjukkan bahwa target capaian selama tiga tahun kebelakang, yaitu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2007 ini bisa dilihat dari perubahan grafik di bawah, yang ternyata peningkatannya hanya sebesar 1,02 dari tahun 2005 ke 2006, dan mengalami penurunan pada tahun 2006 ke tahun 2007, yaitu peningkatannya hanya sebesar 0,52 saja. Dengan demikian kondisi capaian yang tidak stabil ini tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk capaian target harapan yang diproteksikan untuk tahun 2008 dan tahun 2009. Di mana dari RKPD yang dirumuskan ini untuk pembangunan bidang pendidikan pada dua tahun ke depan mampu mendongkrak peningkatan sebesar 3,17 diasumsikan cukup berat. Berbagai kondisi yang masih belum stabil begitu banyak mewarnai perjalanan program dan strategi pembangunan bidang pendidikan di Jawa Barat ini, seperti dukungan pendanaan yang masih jauh dari ideal yaitu sebesar 20% dari total dana APBD, dukungan infrastruktur dan SDM yang belum merata di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat, dengan demikian dua pilar dalam pembangunan bidang pendidikan ini yaitu pilar untuk akses dan pemertaan belum bisa diwujudkan. Jika dua pilar ini belum bisa diwujudkan dan menghasilkan yang optimal, maka dengan otomatis pilar ketiga yaitu mengenai mutu juga tidak dapat diraih oleh Jawa Barat ini.



Sumber: Diolah dari Hasil Olahan Bapeda (PR, 26 Maret 2008).

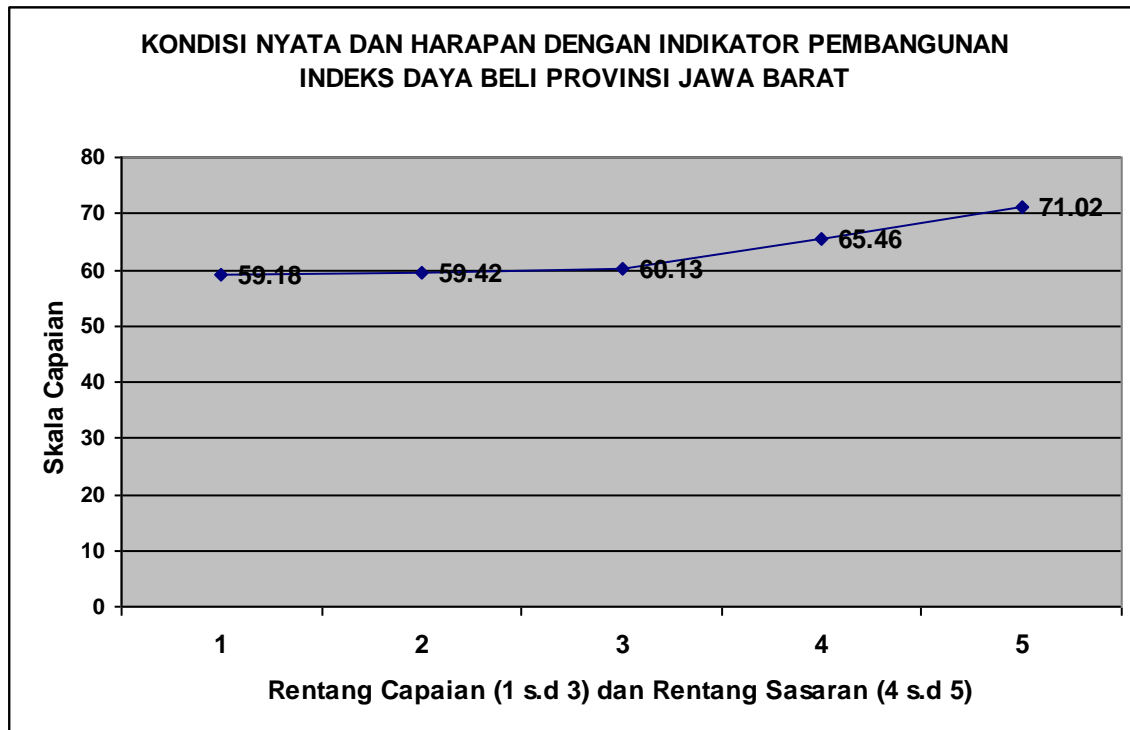
Dari pembahasan di atas untuk bidang pendidikan ini maka setidaknya capaian ini dapat dijadikan cermin bagi siapa saja yang di tahun 2009 ini akan memimpin Jawa Barat hingga mampu membawa pada target capaian yang lebih tinggi dan baik lagi. Sebagai misal dapat dilihat pada beberapa calon gubernur yang sudah mengusung tema-tema politiknya dengan atas nama guru dan bidang pendidikan pada umumnya. Maka jika hal itu ingin diwujudkan, pekerjaan rumah sudah menanti di depan mata.

Daya Beli Lemah

Selanjutnya penulis ingin membawa pembaca semuanya pada analisa capaian dan target sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Jawa Barat ini untuk bidang pembangunan Indeks Daya Beli. Kondisi ini juga cukup berat mengingat pada tiga tahun sebelumnya capaian kemampuan masyarakat Jawa Barat mulai tahun 2005 hingga tahun 2007 masih berkutat pada skala capaian 50,10; 50,42 dan 60,13. Jika strategi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat ini tidak dirubah maka mustahil untuk bisa mampu mewujudkan target sasaran yang diproyeksikan untuk dua tahun ke depan yaitu tahun 2008 dan 2009 bisa menambah point yang rata-rata tidak tahunnya antara 5,33 sampai dengan 5,56 pada skala capaian indeks pembangunan daya beli masyarakat Jawa Barat ini.

Kondisi ini juga sangat berat, mengingat nilai tukar rupiah secara nasional dan dunia terus melemah, upah minimal para karyawan bagi negeri maupun negeri tidak ada peningkatan yang signifikan. Padahal di sisi lain nilai dan harga jual setiap kebutuhan hidup sehari-hari terus naik. Maka jika dikaitkan dengan isu strategis dalam RKPD yang sudah dirumuskan sebelumnya temuan ini membuktikan begitu penyebarannya dari hari-ke-hari kondisi kemiskinan di Jawa Barat semakin cepat. Jika para pimpinan dan jajarannya tidak juga melakukan perubahan dan perbaikan ke depan maka pembangunan dibidang

ini mustahil untuk bisa berhasil. Di mana secara teoritis analisa perhitungan antara angka capaian dan target sasaran sangat besar perbedaannya.



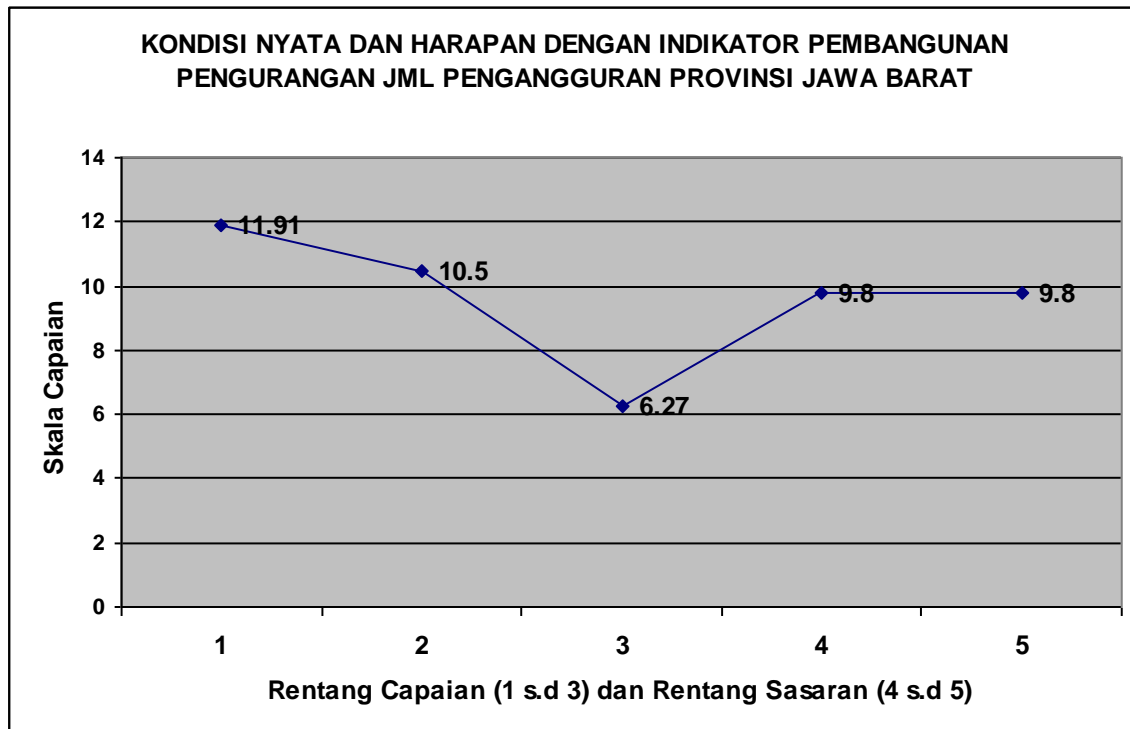
Sumber: Diolah dari Hasil Olahan Bapeda (PR, 26 Maret 2008).

Sistem dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kerakyatan yang pernah dikembangkan sejak tahun 1990 ternyata kurang mendapat dukungan yang optimal baik dari pemerintah maupun dari unsur kesadaran masyarakat itu sendiri. Fenomena yang dapat dijadikan dasar bukti bahwa masyarakat Jawa Barat ini kurang berhasil dalam bidang perekonomian ini, yaitu banyak pengusaha-pengusaha kecil yang tidak optimal dalam perolehan pembinaan dalam mengembangkan usahanya, demikian juga dari kelancaran dukungan dana untuk modal masih sulit diwujudkan. Berbagai faktor dalam aspek ini sangat kompleks. Setidaknya dengan banyaknya para pedagang dan pengusaha kecil yang banyak meminjam modal dari bank-bank swasta kecil dengan bunga yang cukup tinggi. Sedangkan penyediaan kredit dari bank-bank pemerintah begitu sulit untuk memperolehnya, terutama dengan setumpuk persyaratan yang harus dipenuhi, maka kondisi ini mengakibatkan tidak terkendalinya daya beli dan sistem perekonomian di Jawa Barat, minimal selama tiga tahun terakhir ini.

Pengangguran

Kondisi yang sedikit melegakan, secara hitung-hitungan dari capaian pembangunan yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir ini di Jawa Barat yaitu pembangunan dibidang penekanan jumlah pengangguran. Walaupun penurunan terjadi tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan proyeksi dua tahun yang akan datang. Namun dengan modal sebesar 6,27 dari titik awal skala capaian penurunan jumlah pengangguran ini maka tidak terlalu dikhawatirkan dengan dari target proyeksi dua tahun hingga tahun 2009 ini hanya akan meningkat sebesar 3 point. Jadi jika hitung-hitungan

dengan awal mula jumlah pengangguran di tahun 2005 memang cukup tinggi, namun dengan adanya kemampuan Jawa Barat dalam mengembangkan strategi dan gaya serta pemberdayaan pihak-pihak dan dunia lapangan kerja untuk mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja baru, menjadikan kondisi pembangunan dibidang penekanan pengangguran ini boleh dikatakan cukup melegakan. Kenapa ini cukup melegakan, karena dewasa ini di Jawa Barat banyak sekali pembangunan-pembangunan infrastruktur dibidang bisnis, perusahaan, serta perumahan dan jaringan sistem informasi yang sudah mulai masuk ke pelosok. Dengan demikian kesempatan kerja dapat terbuka dengan lebar.



Sumber: Diolah dari Hasil Olahan Bapeda (PR, 26 Maret 2008).

Kontribusi Pendapat Masyarakat dan Pemodelan

Masyarakat hendaknya sedikit pintar dan mampu mengevaluasi idealisme para Calgub secara bijaksana dan realistis. Fenomena setelah beberapa hari kampanye bergulir dari setiap daerah begitu variatif menghiasai halaman depan media masa di mana-mana. Demikian juga dengan antusias golongan masyarakat dari daerah yang berbeda tidak ada perbedaan. Semuanya terlihat masuk ke dalam buaian dan janji-janji Calgub semata sehingga banyak golongan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dengan kendaraan politiknya mendapat keuntungan-keuntungan sesaat. Mulai dari keuntungan merasa diterima, merasa dekat dan merasa sudah memperoleh dukungan untuk mewujudkan cita-cita kelompok partai politiknya.

Fenomena di atas jika penulis analisa, ternyata di Nusantara ini sudah berjalan puluhan tahun, itu berjalan seperti air mengalir begitu saja. Banyak Pakar dan pengamat politik yang menilai kegiatan rutin Pilkada ini hingga dikatakan ” Tidak Rame”, ”Hanya Bgeitu-Begitu Saja”. Padahal potensi untuk melakukan analisa terhadap pengalaman tahun-tahun lalu sangat terbuka, khususnya dalam upaya menemukan formula-formula pembangunan para calon Gubernur setelah mereka menjabat nanti.

Sebagai misal mereka bisa merumuskan formula tertentu dengan berbasiskan atas data-data capaian tahunan-tahun sebelumnya. Terlebih dari hasil analisa kepemimpinan gubernur sebelumnya yang berbeda maka beranikanlah untuk mengkritik dan mencoba menawarkan formula perbaikan-perbaikan. Tengoklah kritikan atau masukan Bupati Indramayu Ir. H. Irianto, M.Si ketika ia mengkritik sistem pembangunan bidang pendidikan yang dilakukan Pemda Jabar. Padahal pihak-pihak yang mengkritik tersebut sangat memiliki alasan kuat dan rasional. Seandainya kondisi politik dan kebijakan seperti itu dapat dijadikan input pemodelan sistem pembangunan Jawa Barat dikemudian hari dalam segala bidang hal itu akan sangat bermanfaat. Sebagai misal mengenai beberapa tema-tema politik dalam kampanye tiga pasangan sekarang ini mulai dari DAI, AMAN dan HADE, semuanya masih terlihat instan.

Kemampuan pada tataran instan inilah yang selama ini terbukti masih rapuh dan tidak bisa diwujudkan. Bukti nyata apakah selama ini janji-janji dan tema-tema politik yang ideal dari seorang yang menjabat sekarang bisa dibuktikan dengan benar. Bisa didengar sangat banyak masyarakat, kelompok-kelompok tertentu hingga saat ini masih menangih janji-janji politik pimpinannya, misalnya kita bisa baca dalam harian "Fajar Banten" dimana rakyat menuntut janji-janji politik Rano Karno sebagai Wakil Bupati Tangerang sekarang.

Penulis mengajak kepada seluruh masyarakat Jabar yang memiliki kesempatan untuk menganalisa dan mengisi angket yang diterbitkan Bapeda Jabar mengenai relevansi Prioritas Program dengan Isyu Strategis yang ada pada RKPD Jabar untuk tahun 2009 tersebut. Kontribusi ide-ide dan penilaian dari masyarakat sangat penting sangat penting sekali sebagai input bagi tim penyusun RKPD. Data yang terisi pada angket tersebut akan benar-benar mampu memotret kondisi nyata masyarakat sekarang serta kebenaran dan ketajaman dari apa yang sudah dirumuskan oleh Bapeda Jabar.

Sebuah pemodelan tentang bagaimana insyu-isyu strategis bisa diimplementasikan oleh para pimpinan atau calon pimpinan hendaknya dapat disumulasikan. Sehingga ketika ia menjabat dan memenagkan kampanye seperti dalam pemilihan gubernur jawa barat ini akan lebih mampu menanamkan kepercayaan awal kepada masyarakat. Kenapa hal ini dikatakan kepercayaan awal, karena ketiga sudah menjabat dan mengimplementasikan programnya kadang ditengah jawalan mengalami kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Suatu fenomena dari kampanye politik dalam pemilihan calon gubernur jawa barat ini ataupun dalam pemilihan presien sekalipun biasanya terdengar bentuk-bentuk konsekuensi verbal bahwa" Saya siap dicopot atau lengser jika sudah 3 tahun tidak berhasil membawa kepada perubahan masyarakat secara lebih baik". Kata-kata tersebut acapkali sering terdengar dari para calon pimpinan tertentu dalam kampanye politiknya.

Seandainya komitmen-komitment seperti itu disampaikan dengan menambahkan bentuk-bentuk simulasi dari pemodelan-pemodelan yang mereka rencanakan jika memenangkan kampanye politik ini maka nilai kepercayaan masyarakat setidaknya akan lebih lengkap. Jadi pemodelan-pemodelan dalam bentuk simulasi ini ternyata penulis amati belum begitu bisa disiapkan selama ini, baik dalam level kampanye tingkat nasional, regional maupun lokal. Padahal seseorang calon pimpinan seharusnya sudah siap bukan hanya cukup dengan janji, pemikiran, dan dukungan masa serta tim suksesnya saja, namun harus melengkapi diri dengan pemodelan dan bentuk-bentuk konsekuensi program yang sudah betul-betul teruji. Pemodelan ini sebetulnya bisa berasal dari hasil

risett atau eksperimentasi terbatas yang diuji secara terbatas pula, namun dilakukan dengan tidak jauh berbeda dengan kondisi nyata yang akan dihadapi ketika calon pemimpin tersebut akan melakukannya pada level yang lebih tinggi dan luas.

Sebagai contoh, seorang calon pimpinan hendaknya memiliki wilayah piloting proyek untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam segala bidang yang ia payungi dengan bentuk dan sistem pengelolaan sebuah negara, atau sebuah wilayah provinsi, atau Kabupaten/Kota hingga level RT sekalipun. Dalam wilayah piloting ini, maka praktek-praktek dan bentuk-bentuk manajemen pemerintahan yang sesuai dengan karakter masyarakat, bentuk dan kondisi kewilayahan serta geografis betul-betul bisa diuji. Demikian juga dengan praktek-praktek program kerja yang akan dijadikan bahan ketika ia harus memenuhi uji fit and proper test sudah bisa terlihat hasil ujicobanya. Pada intinya ketika kampanye akan dilakukan maka ia sudah memiliki pemodelan bentuk pemerintahan dan praktek manajemen pemerintahan yang nyata dirumuskan berdasarkan hasil uji coba dan eksperimentasinya pada wilayah piloting masing-masing.

Kontribusi Pemikiran dari Para Calon Gubernur

Dari beberapa hari ini janji politik yang diusung oleh masing-masing Calgub, baik itu DaI, Aman maupun Hade, masih terlihat belum ada yang secara menyeluruh menawarkan janji politik berbasiskan data real dan terukur. Namun hanya beranjak atas dasar pemikiran parsial, dimana isu-isu dari masyarakat secara kedaerahanlah yang dijadikan tema kampanye politiknya. Padahal jika melihat database pekerjaan rumah pembangunan di Jawa Barat sebagaimana yang tersimpan rapih dan kecenderungan kurang begitu menarik dijadikan dasar kampanye politik ternyata sangat banyak. Hal itu sebetulnya bisa menjadi dasar kuat kenapa pasangan calgub mengusung tema yang dimaksud, sebagai contoh untuk Hade, mereka akan mencoba melakukan perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya memperjuangkan guru dengan rumus-rumus menjadi guru "Hade" itu seperti apa. Akan tetapi jika penulis analisa dan dikaitkan dengan tingkat capaian pembangunan bidang pendidikan di Jabar sebagaimana dipaparkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang dalam Pikiran Rakyat Edisi Minggu, 6 April 2008, ternyata hanya APM SD/MI dan Paket C yang baru melampaui target Nasional, ituoun hanya leading sebesar 1,65%. Sedangkan untuk APK SMP/MTS, SMA/SMK/MA masih rendah. Kesimpulannya pembangunan pendidikan di Jawa Barat masih tertinggal. Terlebih jika melihat lagi Indeks Pembangunan bidang Pendidikan dalam Tabel Capaian Indikator Pembnaganan Jawa Barat hasil oleh Bapeda ternyata bidang pendidikan ini terlihat dari tiga tahun terakhir ini ada kenaikan walaupun tidak besar yaitu hanya 1,02% (2005 ke 2006); 0,52% (2006-2007); sedangkan untuk sasaran tahun 2008 ke 2009 Jawa Barat telah menetapkan angka kenaikan sebesar 1,3%. Dengan demikian strategi seperti apa yang bisa dilakukan oleh Jabar-1 beserta timnya ini. Terlebih RPJMD belum ditetapkan, dan ironisnya kenapa bisa RKPD dirumuskan terlebih dahulu, dengan alasan waktu penetapan RPJMD berbarengan dengan jadwal Pilkada Provinsi. Demikian juga strategi dan pendekatan program kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan oleh calon Gubernur di tahun-tahun mendatang supaya capaian pembangunan bidang pendidikan di Jawa Barat ini bisa lebih baik. Jangan sampai provinsi terpadat di Indonesia ini, ranking pembangunan di bidang pendidikannya masih berada pada peringkat 20 dari 33 provinsi (untuk APK Wajar Dikdas). Demikian juga ditegaskan Mendiknas bahwa secara keseluruhan proses pembangunan pendidikan di Jabar, masih banyak tertinggal dengan provinsi lainnya.

Maka kembali pada tema-tema politik calgub yang mengusung masalah pembangunan dan perbaikan dibidang pendidikan, baik sistem, prosedur, perbaikan SDM dan infrastruktur harus jelas dan berdasarkan atas data real hasil capaian indikator pembangunan yang sudah dicapai. Jika para calgub tersebut mampu membaca dan memiliki tim sukses yang kuat dalam menganalisa dna merumuskan data-data capain pembangunan dalam semua bidang maka dapat dipastikan tema-tema politiknya bisa membawa kepada perubahan pembangunan yang lebih baik.

Mulailah menguji

Hari minggu tanggal 13 Aprl seluruh masyarakat Jabar akan mulai memberikan kepercayaannya tehradap par acalon gubernur yang sudah siap dipilih. Tentunya kita jangan lupa untuk memulai menguji kepada calon terpilih nanti. Kenapa dikatakan ”menguji”, karena hal ini akan erat kaitannya dengan janji dan rencana program pembangunan yang sudah dirumuskan oleh gubernur sekarang ataupun gubernur terpilih mengenai apa yang mereka paparkan selama kampanye. Secara khusus untuk gubernur yang menjabat sekarang, maka pengujian oleh masyarakat terhadap persiapan dan pelaksanaan strategi-strategi pembangunan yang sudah dirumuskan dalam RKPD hingga tahun 2009 ini yang harus sesuai dengan isu-isu strategis sebagaimana yang telah diolah datanya oleh Bapeda Provinsi Jawa Barat tempo hari.

Namun demikian terlepas dari bentuk-bentuk pelanggaran dan isu-isu adanya pelanggaran selama kampanye politik semua calon gubernur di jawa barat yang mulai terdengar dalam berbagai media masa akan tetapi jangan sampai hal itu menjadi alasan bagi lemahnya proses pengujian publik terhadap calon-calon gubernur Jaw Barat. Mudah-mudahan ke depan provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan semua program pembangunannya sehingga mampu membawa kepada perubahan ke arah yang lebih baik lagi, khususnya bagi generasi penerus bangsa Indonesia secara keseluruhan. Terlebih apa yang telah bergulir di Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi proinsi lainnya.